

GRANT GLOBAL RISK FINANCING FACILITY (GRIF) PROJECT

Grant No. TF0B4675

PENGUMUMAN PERNYATAAN MINAT

JUDUL KEGIATAN: DISASTER RISK MANAGEMENT JASA KONSULTAN UNTUK PENYUSUNAN KAJIAN EVALUASI KEGIATAN PRABENCANA/EVALUATION ON THE CURRENT PRE- DISASTER PHASE PROGRAM/ACTIVITIES/PROCEDURES CONSULTANT

Sejak kejadian tsunami Samudera Hindia tahun 2004, Pemerintah telah melakukan reformasi terhadap program penanggulangan bencana di Indonesia, salah satunya dengan pembentukan BNPB sebagai lembaga koordinator untuk penanganan bencana. Seiring perjalanan waktu, paradigma kebencanaan mulai bergeser menjadi lebih proaktif pada upaya pengurangan risiko bencana serta adanya keterlibatan semua unsur Masyarakat dalam penanganan bencana.

Hingga tahun 2024, telah banyak upaya-upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana yang dilakukan di tingkat kementerian dan lembaga serta di tingkat daerah. Namun belum pernah dilakukan suatu kegiatan evaluasi secara komprehensif mengenai kebijakan, program dan kegiatan di bidang pra bencana yang telah dilakukan oleh kementerian dan lembaga di tingkat nasional, serta perangkat daerah di tingkat daerah.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, kajian evaluasi terhadap kebijakan/program/kegiatan di tahap prabencana sangat diperlukan. Kajian ini harapannya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan regulasi untuk pelaksanaan penanggulangan bencana tahap pra bencana yang lebih optimal, serta menjadi bahan pertimbangan untuk pelaksanaan Dana Bersama Penanggulangan Bencana. Oleh karena itu, kajian evaluasi program prabencana perlu dimasukkan ke dalam rancangan Annual Work Plan and Budget (AWPB) Proyek Hibah Global Risk Financing Facility (GRiF) Tahun Anggaran 2024-2025 Deputi Bidang Pencegahan, dalam hal ini Direktorat Peringatan Dini dan Direktorat Mitigasi Bencana, akan menjadi penanggung jawab kegiatan dalam rangka memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Maksud kegiatan ini adalah melaksanakan kajian evaluasi terhadap kegiatan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana yang telah dilakukan oleh BNPB, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan implementasi dana bersama penanggulangan bencana.

Tujuan dari kajian ini adalah :

1. Tersedianya dokumen hasil evaluasi terhadap kegiatan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana yang telah dilakukan oleh BNPB, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan implementasi dana bersama penanggulangan bencana dan kegiatan pada tahap pra-bencana.
2. Tersedianya hasil rekomendasi berdasarkan kajian evaluasi terhadap kegiatan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana yang telah dilakukan oleh BNPB, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan implementasi dana bersama penanggulangan bencana dan kegiatan pada tahap pra-bencana.
3. Tersedianya Peta Jalan (*Roadmap*) implementasi dana bersama penanggulangan bencana untuk kegiatan pada tahap pra-bencana.

Ruang Lingkup Pekerjaan

- Mengidentifikasi pemangku kepentingan serta perannya dalam pemanfaatan dana bersama penanggulangan bencana untuk kegiatan pada tahap prabencana (Pemerintah, Pemerintah Daerah, Akademisi, Komunitas dan Lembaga Usaha);
- Meninjau semua dataset informasi terkait tata kelola, kebijakan, program, kegiatan penanggulangan bencana pada tahap prabencana;
- Mengumpulkan hasil studi dan kajian, data dan informasi terkait dengan implementasi dana bersama penanggulangan bencana pada tahap prabencana;
- Menilai mekanisme pelayanan atau aksesibilitas ketersediaan data berkaitan dengan penanggulangan bencana pada tahap prabencana;
- Mereviu praktek terbaik internasional dalam pemanfaatan dana Bersama penanggulangan bencana untuk kegiatan pada tahap prabencana;
- Menilai kebutuhan dan prasyarat pemangku kepentingan terkait perencanaan dan implementasi dana bersama penanggulangan bencana pada tahap prabencana;
- Menyusun rekomendasi berdasarkan hasil identifikasi permasalahan terkait dengan aspek: Rule (kegiatan prabencana), Opportunity (Peluang), Capacity (Kapasitas), Communication (Komunikasi), Interest (Kepentingan), Process (Proses), dan Ideology (Ideologi) yang terkait dengan tata kelola, kebijakan, program, kegiatan prabencana;
- Menyusun Peta Jalan (Roadmap) implementasi dana bersama penanggulangan bencana untuk kegiatan pada tahap prabencana;
- Mengkoordinasi dan mengorganisir berbagai pemangku kepentingan atau narasumber yang berkaitan dengan kegiatan Kajian Evaluasi Kegiatan Pra Bencana yang dapat dilakukan melalui berbagai pertemuan rapat, FGD, lokakarya workshop) atau bentuk pertemuan lainnya;
- Membuat metodologi dan langkah-langkah untuk menyusun daftar rincian masalah, tools dan indikator evaluasi yang tepat dan sesuai sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi hasil analisis dan kajian yang mengatur tentang tata Kelola, kebijakan, program, kegiatan prabencana;
- Menyusun hasil analisis dan kajian evaluasi serta rekomendasi dan rencana tindak lanjut tata Kelola, kebijakan, program, kegiatan prabencana;
- Menyusun laporan kemajuan bulanan terkait dengan tahapan yang sudah dilakukan, kendala yang dihadapi, serta rencana kerja selanjutnya;
- Menyusun laporan akhir sesuai dengan tahapan yang sudah dilakukan.
- Pembuatan infografis dan bahan sosialisasi hasil kajian evaluasi dan dokumen peta jalan.

Kualifikasi Penyedia

Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud di atas, penyedia jasa konsultasi harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- Berdomisili di Indonesia untuk perusahaan nasional;
- Memiliki NIB/SIUP, TDP, NPWP serta Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya untuk perusahaan nasional;
- Memiliki KBLI Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (70209), ;
- Memiliki pekerjaan sejenis dengan kontrak dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak, dibuktikan dengan bukti kontrak/referensi dari pengguna yang dilengkapi dengan nilai pekerjaan;
- Melampirkan Laporan Keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik atau yang dikeluarkan oleh bank (*bank statement*)
- Melampirkan bukti pembayaran pajak perusahaan Tahun 2023;
- Perusahaan tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/ atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan, tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia barang/jasa;

- Untuk perusahaan nasional, mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas berupa milik sendiri atau sewa yang dibuktikan dengan surat pernyataan

Tenaga Ahli tidak akan dievaluasi pada tahap pemilihan.

Menjadi perhatian Konsultan yang berminat tertuju pada Bagian III, paragraf, 3.14, 3.16, dan 3.17 “Peraturan Pengadaan untuk Peminjam IPF” Bank Dunia September 2023 (“Peraturan Pengadaan”), yang menguraikan kebijakan Bank Dunia mengenai konflik kepentingan.

Konsultan dapat berasosiasi dengan perusahaan lain untuk meningkatkan kualifikasi mereka dalam bentuk usaha patungan atau sub-konsultan. Dalam hal asosiasi, EOI harus secara jelas menentukan apakah asosiasi tersebut berbentuk Kerja Sama Operasi/Joint Venture (seluruh anggota bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh penugasan), atau Sub-konsultansi. Dalam kasus usaha patungan, perusahaan anggota yang ditunjuk untuk mewakili usaha patungan harus diidentifikasi dengan jelas dan semua mitra dalam usaha patungan harus secara tanggung bersama bertanggung jawab atas seluruh kontrak, jika terpilih. Hanya kualifikasi dan pengalaman anggota usaha patungan, bukan sub-konsultan, yang akan dipertimbangkan dalam proses evaluasi EOI.

Konsultan akan dipilih sesuai dengan metode Seleksi Kualifikasi Konsultan (CQS) yang diatur dalam Peraturan Pengadaan.

Informasi lebih lanjut dapat diperoleh pada alamat di bawah ini pada jam kerja.08.00 – 16.30 WIB.

Pernyataan minat harus disampaikan dalam bentuk tertulis ke alamat di bawah ini (secara langsung, atau melalui surat, atau email) paling lambat tanggal 14 Agustus 2024.

Harap melengkapi

- Legalitas perusahaan
- Daftar pengalaman perusahaan
- Daftar personil yang dimiliki
- Surat Perjanjian Kerja Sama (jika diperlukan)



Ditandatangani secara elektronik

Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa BPD LH

JB Tower Lantai 29

Jalan Kebon Sirih Nomor 48-50

RT 11/RW 2, Gambir, DKI Jakarta

Email: pokja.pemilihan@bpd lh.id

